



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 837 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya tim yang bertugas melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Lembata Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3967);

30/11/23

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Lembata kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 43);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 5);

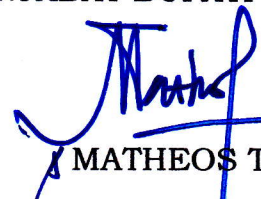
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Lembata Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. membuat analisis atau kajian teknis permohonan perizinan dan non perizinan sesuai bidang apabila diperlukan;
 3. menandatangani berita acara pemeriksaan permohonan perizinan dan non perizinan;
 4. memberikan rekomendasi atau pertimbangan teknis atas permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 5. mengadakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan non perizinan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Lembata melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan dilakukan secara terintegrasi melalui subsistem pengawasan pada *Sistem Online Single Submission (OSS)*.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 4 september 2023
PENJABAT BUPATI LEMBATA,


MATHEOS TAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 837 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO KABUPATEN
LEMBATA

TIM PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KABUPATEN LEMBATA

NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
1	Benediktus Leubi, S.Sos/ 19701222 200012 1 002	Ketua		DPMPPTSP
2	Martianus M. Giga, SE., M.Ec.Dev/ 19720701 200012 1 006	Sekretaris		DPMPPTSP
3	Amin Pati, SE/ 19691231 300012 1 051	Koordinator Pengawasan		DPMPPTSP
4	Maria Teresia Beribi, SH/ 19740117 200012 2 005	Koordinator Pengelola Perizinan		DPMPPTSP
5	Apolonaris Suban, S.Sos/ 19650929 20012 1 003	Koordinator Pengelola Perizinan		DPMPPTSP

NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
6	Daniel Surya S.T. Kamalera, S.H.,M.Hum/ 19830820 200903 1 006	Koordinator Hukum dan Perundang- undangan		Sekretariat Daerah
7	Mario Paulus Yoseph Sara, ST/ 19840506 201101 1 001	Perizinan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Anthonius Josaphat+ Bruno, S.T/ 19840210 201903 1 006	Perizinan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Kornelis Leu	Perizinan Bidang Tata Bangunan	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Longginus Lagadoni/ 1980070780 200012 1 002	Pengawasan Bidang Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Agustinus Dominikus Tueng Lazar/ 19830320200903100 9	Perizinan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
12	Yakobus Virgilius B. Toby, ST/ 19890626 201903 1 009	Perizinan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup

f p /

NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
13	Yohanis Lalang, ST	Perizinan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
14	Patrisius Pulang/ 19731216 200501 1 009	Perizinan UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
15	Mikhael Boli	Perizinan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16	Dominggo San Allen Arkian	Perizinan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi
17	Christina Anjelina Sabu Koles/ 19980614 202203 2 018	Perizinan Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18	Gilbertus Nuo	Perizinan Bidang Pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
19	Yulianus Sandrio Mantri/ 19950305 202012 1 003	Pengawasan Bidang Pengawasan	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
20	Fredyk Tokan Sukacita	Perizinan Bidang Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan

NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
21	Gabriel P. Bolilera	Pengawasan Bidang Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
22	Rosalia Sabu Ola	Pengawasan Bidang Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
23	Fransiskus Laba Ola/ 19770328 200604 1 002	Perizinan Bidang obat dan Makanan	Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
24	Vianey Andre Sinu Bediona	Perizinan Perhubungan Darat	Perhubungan	Dinas Perhubungan
25	Klemensia Manis Purab/ 19870426 200604 2 002	Perizinan Bidang Perhubungan Darat	Perhubungan	Dinas Perhubungan
26	Thomas T.k. Hurek Making/ 19860128 201101 1 005	Pengawasan Bidang Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
27	Abdul Hamid	Perizinan Bidang Perhubungan Laut	Perhubungan	Dinas Perikanan
28	Delaila Santy Wabang/ 19961216 202203 2 010	Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
29	Theresia S. Making/ 19740513 200012 2 003	Pengawasan Bidang Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Fajal

NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
30	Maria Magdalena Keke/19730423 200112 2 003	Perizinan Bidang Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
31	Martinus Surung/ 19751222 200112 1 009	Perizinan Bidang Perindustrian	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
32	Kristianus Frederik Florian Keraf/199611252022 03 1 005	Pengawasan Bidang Perindustrian	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
33	Stevanus Bala/ 19720728 20012 2 001	Pengawasan Bidang Perdagangan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
34	Marselina Jawa Kote/ 19770521 200701 2 028	Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	Maria Karisima Baoninang/ 19730712 20012 1 002	Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
36	Maria Petronela T. Atawolo/ 19840323 200312 2 001	Anggota		DPMPTSP
37	Silvester Doni Sesa/ 19760430 200012 0031	Anggota		DPMPTSP

NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
38	Melchior Doni Boli/ 19690605 200012 1 009	Anggota		DPMPTSP
39	Veronika Peni/ 19850926 201101 2 014	Anggota		DPMPTSP
40	Flora Cornelia Kareko/ 19771116 200012 2 003	Anggota		DPMPTSP
41	Nurjana/ 19740519 200701 2 021	Anggota		DPMPTSP
42	Dariyani Merlys Kristien S Kelendonu/ 19730311 199903 2 006	Anggota		DPMPTSP
43	Putri Krisdayanti Maika/ 19940207 202203 2 009	Anggota		DPMPTSP
44	Paulus Tua/ 19720924 200701 1 013	Anggota		DPMPTSP
45	Maria Irmina Irma Tukan/ 19771001 200801 2 023	Anggota		DPMPTSP
46	Rosnawati Abdul Hamid / 19741204 200801 2 009	Anggota		DPMPTSP

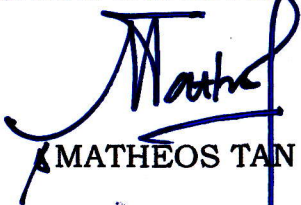


NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
47	Wilhelmus Wolo/ 19730418 200906 1 001	Anggota		DPMPTSP
48	Rafael Nele Raring/ 19650827 201001 1 002	Anggota		DPMPTSP
49	Sebastianus Bernadus Lusi/ 19810514 201212 1 002	Anggota		DPMPTSP
50	Emanuel Pati/ 19711225 200906 1 002	Anggota		DPMPTSP
51	Maria Hendrati Mansur	Anggota		DPMPTSP
52	Gregorius Lako Lebangu	Anggota		DPMPTSP
53	Anna Kolly Dasion	Anggota		DPMPTSP
54	Nur Faidah	Anggota		DPMPTSP
55	Heibertus B. Ola Udak	Anggota		DPMPTSP
56	Agustina S. Ose Waiwuring	Anggota		DPMPTSP

f-pj

NO	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Sektor	OPD
57	Mahmud Burhan Ahmad	Anggota		DPMPTSP
58	Alvionita Anggraini Wibowa	Anggota		DPMPTSP

PENJABAT BUPATI LEMBATA. f


MATHEOS TAN